

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN PANDEGLANG

Muhammad Fahrijal<sup>1</sup>, Budi Hasanah<sup>1\*</sup>, Ahmad Sururi<sup>2</sup>

Universitas Serang Raya<sup>12</sup>, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa<sup>2</sup>

Email\*: budihasanah@gmail.com

**Abstrak.** Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui instrument wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang dipilih tersebut disebut *key informan* yaitu pelaku UMKM, Aparatur Sipil Negara dan masyarakat umum. Adapun Teknik analisis data menggunakan tahapan reduksi, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pandeglang masih belum efektif terutama dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya kebijakan-kebijakan terukur dan mampu diterima masyarakat, pemilihan prioritas sumber daya dan komunikasi intensif antar pelaksana.

**Kata Kunci:** Sistem Pendukung Usaha, UMKM, Pandeglang,

**Abstract.** The purpose of the study was to determine how the implementation of the business support system development programme for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pandeglang Regency. The research method uses a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interview instruments, observation and documentation. The selected data sources are called key informants, namely MSME actors, State Civil Apparatus and the general public. The data analysis technique uses the stages of reduction, verification and conclusion. The results showed that the implementation of the Business Support System Development Program for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pandeglang Regency was still not effective, especially from the dimensions of policy size and objectives, resources, inter-organisational communication and implementing activities. The research findings show the importance of measurable policies that are acceptable to the community, prioritisation of resources and intensive communication between implementers.

**Keywords:** Business Support System, MSMEs, Pandeglang,

Receive: October 3, 2024

Revision: October 6, 2024

Accepted: October 20, 2024

Copyright©2024. Muhammad Fahrijal, Budi Hasanah, Ahmad Sururi

This is an open access article under the CC-BY NC-SA license

### Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri merupakan salah satu bagian terpenting dari perekonomian suatu bangsa dan daerah tak terkecuali di Indonesia. UMKM merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Sejak krisis moneter ditahun 1997 yang belakangan ini telah berkembang menjadi krisis multidimensi, Indonesia telah berupaya menata kembali pembangunan diberbagai sektor. Selama pemerintah Orde Baru tingkat pengangguran semakin besar, kemiskinan

**Correspondence** Budi Hasanah  Email: budihasanah@gmail.com

*Implementasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pandeglang*

ini tak kunjung berkurang, dan kesenjangan antara sektor, antar pelaku dan wilayah semakin besar. Tingkat pengangguran juga masih sangat besar, terlebih lagi setelah terkena dampak krisis moneter ini. Banyak perusahaan besar dan perbankan yang bangkrut dan memberhentikan karyawannya atau PHK. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan suatu unit usaha kecil yang mampu berperan serta berfungsi sebagai katup pengaman baik dalam menyediakan alternatif kegiatan usaha produktif, alternative penyaluran kredit, maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. UKM dianggap penyelamat perekonomian Indonesia di masa krisis periode 1999-2000.

Pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan atau masalah melebarnya kesenjangan antar sektor atau pelaku usaha. UMKM memiliki potensi strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional. Selain menyediakan barang dan jasa, UMKM banyak menyerap tenaga kerja, UMKM juga merupakan kelompok yang telah terbukti tahan terhadap goncangan krisis perekonomian yang melanda. Begitu pentingnya peran UMKM sehingga mereka mendapatkan perhatian yang begitu besar, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Negara-negara lain seperti Italia diberikan oleh industri kecil dan menengah. Demikian juga di USA, Jepang dan Taiwan, UMKM mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomiannya dibandingkan oleh usaha besar (Dipta, 2000).

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting di suatu daerah, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Pengembangan UMKM ini dijadikan sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu peranan pemerintah serta masyarakat sangat penting dalam peningkatan pengembangan UMKM (Abdul hakim. 2014). Oleh karena itu maka pengembangan UMKM perlu dioptimalkan karena keberadaan UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi di negara Indonesia. UMKM juga merupakan salah satu rencana pemerintah untuk mengatasi pengangguran yang terjadi di tiap tahunnya

Pengembangan UMKM yang ada di Indonesia berbagai kegiatan dan program pun dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan daerah. Dalam Undang- Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memberdayakan dan mengembangkan UMKM yang ada. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional. Dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa pengembangan usaha dilakukan terhadap usaha Mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Pengembangan usaha dapat meliputi fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan usaha. Pemerintah Pusat dan daerah memprioritaskan pengembangan Usaha mikro, usaha kecil dan menengah dengan berbagai cara yang dilakukan. Dengan cara inilah yang akan membantu UMKM dapat berkembang dan tumbuh sehingga Kontribusi UMKM dapat terasa dan terlihat. Regulasi Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Sulanjari, 2016).

Pertumbuhan UMKM sendiri tumbuh dengan pesat sejak krisis moneter ditahun 1998. jumlah UMKM yang ada di Indonesia mendekati 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 114,14% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Ditahun 2017 jumlah UMKM yang ada di Indonesia mencapai 62,9 juta unit dengan tingkat serapan tenaga kerja 3-5 tenaga kerja pada masing-masing UMKM. Dengan jumlah tersebut pemerintah berharap dapat mengurangi tingkat pengangguran 1 – 2 %. Faktor perkembangan UMKM, berkembangnya usaha mikro kecil menengah di Indonesia tidak bisa lepas dari faktor yang mendorong terjadinya kemajuan ini. Menurut faktor yang mendorong majunya perkembangan UMKM di Indonesia, yaitu pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi, majunya UMKM di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Beberapa penelitian menunjukkan kalau salah satu faktor yang mendukung perkembangan UMKM adalah karena pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.

Para pelaku usaha mulai memanfaatkan sarana teknologi seperti smartphone untuk melebarkan pasar usahanya serta menggunakan aplikasi komunikasi seperti whatApp dan media sosial untuk memasarkan produk yang dijualnya, bahkan sudah menjadi target pemerintah untuk membuat pelaku UMKM untuk memanfaatkan dunia digital, seperti e-commerce, untuk menjual dan mengembangkan usahanya, mengutip dari salah satu sumber berita, kemenkop RI melaporkan kalau sudah ada sekitar 8 juta UMKM yang sudah Go-Digital pada tahun 2017 lalu. Jumlah ini sebanyak 14% dari total 59.2 juta UMKM yang berdiri di Indonesia. Angka ini diharapkan untuk terus bertambah karena tingginya jumlah UMKM yang Go-Digital sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Digital Energy of Asia tahun 2020 mendatang.

Perkembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Pandeglang yang bergerak di bidang agrobisnis sampai dengan saat ini baik secara kualitas dan kuantitas belum mencapai seperti apa yang diharapkan, terlihat dari data yang tercatat di dinas koperasi dan UMKM kabupaten pandeglang pada akhir tahun 20 dari jumlah koperasi berbadan hukum sebanyak 805 unit, yang bergerak di bidang agrobisnis dan penunjang agrobisnis berjumlah 88 unit, yang aktif sebanyak 0 tidak aktif sebanyak 78, sedangkan jumlah UMKM se kabupaten pandeglang berjumlah 46,465 yang bergerak di bidang agrobisnis dan penunjang agrobisnis berjumlah 2,734, secara umum koperasi dan usaha mikro kecil menengah memiliki potensi untuk menjadi sarana bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan telah memberikan kontribusi bukan saja terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat pembangunan bidang koperasi dan UMKM merupakan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2008 dibentuk dinas koperasi dan UMKM yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah khusus dibidang koperasi dan UMKM.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Koperasi Pandeglang sudah melaksanakan program pengembangan sistem pendukung usaha seperti kegiatan sosialisasi pemasaran online, kegiatan pelatihan kerajinan tangan, kuliner, kegiatan pameran hari jadi Kab.Pandeglang, hari Koperasi TK Provinsi, hari Koperasi tingkat

Nasional dan pameran event agustusan, kegiatan fasilitas UMKM pemberian sertifikat halal dan bantuan BPUM, pengemasan produk untuk penjualan pasar yang lebih luas, WP bantuan untuk wirausaha pemula, Pelatihan-pelatihan dalam pengemasan produk.

Ditengah program perkembangan sistem pendukung UMKM tersebut masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik UMKM yaitu : kurangnya modal untuk membeli peralatan dan bahan baku, pemilik UMKM yang masih menggunakan kemasan yang belum modern, banyaknya UMKM pemula yang hanya memasarkan produknya dipampang ditoko saja, pemilik UMKM rata-rata yang sudah berumur tidak sadar akan teknologi/digital, Kurangnya fasilitas yang kurang memadai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pandeglang. Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970) dalam Nugroho (2015:43), mendefinisikan kebijakan publik sebagai program yang terproyeksi dari cita-cita, nilai, dan praktik. Sedangkan menurut Anderson dalam Nugroho (2015:43), mendefinisikan kebijakan publik sebagai pelaksanaan tindakan yang relatif stabil dan digunakan untuk tujuan tertentu, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam menghadapi masalah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui instrument wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *snow ball sampling*, dimana dari seluruh sumber informan kemudian dipilih dari sumber data tertentu yang dianggap mengerti permasalahan dan tujuan penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Sumber data yang dipilih tersebut disebut *key informan* yaitu pelaku UMKM, Aparatur Sipil Negara dan masyarakat umum. Adapun Teknik analisis data menggunakan tahapan reduksi, verifikasi dan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh (Miles et al., 2014).

### Hasil dan Pembahasan

#### Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan harus diperhatikan dalam menjalankan suatu kebijakan, karena penegasan mengenai apa yang menjadi standar sasaran, tujuan dan kinerja dari suatu implementasi kebijakan akan menentukan keberhasilan dari kebijakan publik. Begitu juga dengan kebijakan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM tersebut, yang dimana para pelaksana harus mengetahui dari segi tujuan dan sasaran program ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pengembangan sistem pendukung usaha sudah berjalan dengan baik dan lancar, dikarenakan adanya sistem pemerataan dikabupaten pandeglang jadi yang mendapatkan bantuan tidak di khususkan untuk satu kecamatan saja melainkan untuk 35 kecamatan yang ada dikabupaten pandeglang dan kita utamakan itu yang mendapatkan adalah pelaku usaha yang benar-benar mengangkat potensi daerah kabupaten pandeglang, dengan adanya program ini juga bertujuan untuk membantu meringankan para UMKM dalam membangun kembali usaha nya dan mengembangkannya. (wawancara dengan Bapak Sukri S.H selaku Kepala Bidang UMKM Kab. Pandeglang. Selasa, 3 november 2020 pukul 9:59 WIB)”

Selain itu sasaran program ini di Kabupaten Pandeglang sebelumnya sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan baiknya karena kita dibantu oleh APBN pusat melalui program bantuan presiden untuk usaha-usaha produktif dan sasaran yang layak untuk mendapatkan program ini juga termasuk usaha yang sudah berenti karena kekurangan modal. (Wawancara dengan Bapak Sukri S.H selaku Kepala Bidang UMKM Kab. Pandeglang. Selasa, 3 november 2020 pukul 9:59 WIB)

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan sasaran dari program pengembangan sistem pendukung usaha ini masih belum maksimal dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak memiliki usaha tetapi menerima bantuan program ini. Ukuran standar keberhasilan dari pelaksanaan program pengembangan sistem pendukung usaha yaitu memberikan pelayanan bantuan dan pelatihan usaha kepada pemilik UMKM untuk mengembangkan usaha. *“untuk ukuran standar kebijakan yaitu yang benar-benar memiliki usaha, dan untuk para pemilik UMKM harus memiliki legalitas, memiliki SKU minimal, sertifikat halal, e-ktsp, (wawancara Bapak Nurrudin selaku Pelaksana Pada Bidang UMKM Kab. Pandeglang. senin 2 november 2020 pukul 11:30 WIB)*

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan masih belum begitu optimal dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak memiliki usaha akan tetapi menerima bantuan program tersebut.

Dalam ukuran dan tujuan kebijakan di ketahui ukuran dan tujuan dari Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM sudah jelas dan mudah dimengerti oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang selaku implementor dari pelaksana program ini, dari yang sudah diuraikan di atas mengenai Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dapat diketahui bahwa ukuran dan tujuan kebijakan ini merupakan standard dan sasaran yang harus dicapai oleh pelaksana program ini yaitu Dinas Koperasi dan UMKM sebagai implementor utama dari Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh informan mengenai kejelasan adanya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM memiliki tujuan yang jelas karena hal ini mempunyai maksud untuk mengembangkan UMKM dengan melalui Program ini untuk membantu meringankan kebutuhan UMKM, tentunya hal ini juga bukan hanya di UMKM Kabupaten Pandeglang saja tetapi di seluruh Indonesia.

Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan ini berdampak positif karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada setiap daerahnya sehingga dapat mengatasi adanya para UMKM yang berhenti di karenakan modal usaha, melalui program ini pemerintah pusat hanya melibatkan dinas koperasi dan UMKM, kelurahan, desa, bank bri, dan pemilik UMKM guna meningkatkan keberhasilan program ini akan tetapi sasaran dari program ini belum maksimal dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak memiliki usaha akan tetapi menerima bantuan program tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Edward III jika kebijakan-kebijakan di implementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha ini yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait bantuan dan pelatihan untuk pemilik UMKM guna untuk meningkatkan usaha dan

menjalankan lagi usahanya yang tadinya berhenti berjualan dikarenakan kesulitan modal dan menarik pemilik UMKM yang sudah berhenti agar kembali berjualan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan masih belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak memiliki usaha akan tetapi menerima bantuan program tersebut.

### **Sumber Daya**

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tahap-tahap dari implementasi menuntut adanya sumber daya yang memadai, terutama sumber daya manusia yang berkualitas itu akan mempermudah dalam menjalankan program yang keberhasilannya tinggi. Selain sumber daya manusia ada juga sumber daya lainnya yang mendukung yaitu sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya informasi atau kewenangan dan sumber daya finansial atau anggaran.

Dalam hal ini pelaksana program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM di Kabupaten Pandeglang memiliki peran serta fungsinya masing-masing. Adapun peran dan fungsi dinas koperasi dan UMKM mengenai pelaksanaan program ini yang telah diatur dalam pelaksanaannya yang berlaku serta batas waktu untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pelaksana. Disebutkan bahwa “tugas dinas koperasi dan UMKM dalam program ini itu sebagai pengusul, mendaftarkan nama-nama yang mendaftar dan mengecek kembali persyaratan yang telah ditetapkan, akan tetapi kalau untuk sumber daya manusia itu kurang karena melihat pelaku usaha di Kab. Pandeglang yang nilainya fantastis hampir ratusan ribu orang jadi sumber daya manusia dikitupun hanya terbatas hanya 10 orang untuk melancarkan program tersebut. (wawancara dengan Bapak Sukri S.H selaku Kepala Bidang UMKM Kab. Pandeglang, Selasa, 3 november 2020 pukul 9:59 WIB)”

Dari hasil temuan wawancara di atas sumber daya manusia yang ada di dinas kurang mendukung dalam pelaksanaan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. Kepala dinas selaku pihak pelaksana program ini harus menambah sumber daya manusia dan harus mampu melaksanakan program ini dengan sebaik mungkin dan staf pegawai dinas yang bertugas menginput data-data UMKM sebagai penerima program tersebut. Untuk itu dinas koperasi dan UMKM memiliki kepala dinas dan staf pegawai dinas telah memadai akan tetapi dari segi kuantitas sumber daya manusia sangat kurang mendukung. Dan batas waktu penarikan dana dalam waktu 3 bulan itu sudah lebih dari cukup.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya tidak berjalan dengan optimal dikarenakan dari dinas koperasi dan UMKM kekurangan sumber daya manusia dari segi kuantitas dalam menjalankan program ini dan berdasarkan pengamatan peneliti secara langsung dari sarana dan prasarana di dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang kurang memadai. Karena sarana dan prasarana yang disediakan hanya sebatas pelatihan dan pameran pada event tertentu saja yang masih berpindah-pindah tempat, tidak adanya tempat khusus.

Untuk mencapai sebuah keberhasilan implementasi yang sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang dimana dalam menemukan suatu keberhasilan proses implementasi memiliki tahapan tertentu dari seluruh proses

implementasi. Hal ini keseluruhan implementasi menentukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh sebuah kebijakan dan sudah ditetapkan secara apolitik, tetapi kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya tidak ada. Maka dari itu kinerja kebijakan sangat sulit diharapkan. Seperti yang disampaikan oleh Edward III meskipun telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten dari isi kebijakan, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut belum begitu maksimal pada sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana.

Seperti yang diungkapkan oleh (Pradytia, 2016) dalam skripsi yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Tangerang*. Dalam hal ini dalam kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang, bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang sebagai pembuat kebijakan masih belum memaksimalkan sumber-sumber kebijakan seperti sumberdaya manusia, yang masih kurang dari segi kuantitas masih kurang, lalu sumber daya anggaran yang masih minim, dan sumber daya sarana dan prasarana hanya mengandalkan pameran pada event tertentu saja.

Adapun implementasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM di Kabupaten Pandeglang, bahwa dari segi kondisi sumber daya manusia sebagai hasil wawancara peneliti yang telah dilakukan secara kualitas bisa dibilang baik karena mayoritas berpendidikan tinggi namun sayangnya dari segi kuantitas masih kurang sehingga kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang ini masih belum optimal. Kalau untuk sumber daya anggaran sendiri itu sudah cukup memadai karena sumber anggaran itu dibantu oleh APBN dalam menjalankan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM di Kabupaten Pandeglang. Kemudian untuk sumber daya sarana dan prasarana kurang mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan diatas maka dapat di simpulkan bahwa sumber daya belum begitu maksimal dikarenakan dari dinas koperasi dan UMKM kekurangan sumber daya manusia nya dari segi kuantitas dalam menjalankan program ini dan berdasarkan pengamatan peneliti secara langsung dari sarana dan prasarana di dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang kurang memadai dikarenakan sarana dan prasarana yang disediakan hanya sebatas pelatihan dan pameran pada event tertentu saja yang masih berpindah-pindah tempat, tidak adanya tempat khusus.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Pelaksana program pengembangan sistem pendukung usaha ini dijalankan berdasarkan kerjasama pemerintah dan dinas koperasi dan UMKM.

Dalam hasil wawancara dengan narasumber yang akan dipaparkan dibawah mengenai pihak yang terlibat dalam mengimplementasi program pengembangan sistem pendukung usaha di Kabupaten Pandeglang yang menjadi karakteristik agen pelaksana berikut hasil wawancaranya: “kalau untuk pihak mana saja yang terlibat yaitu pemerintah, dinas koperasi dan UMKM, kecamatan yang ada di kabupaten pandeglang,

desa yang ada dikabupaten pandeglang, dan pelaku usaha umkm yang mengajukan program ini, setelah itu pihak yang dilibatkan dalam program ini yang paling utama itu adalah bank bri karena untuk penyaluran itu adanya di bank bri. (wawancara dengan Bapak Sukri S.H selaku Kepala Bidang UMKM Kab. Pandeglang. Selasa, 3 november 2020 pukul 9:59 WIB)

Dari hasil wawancara diatas implementor dan pemilik UMKM memahami alur untuk menerima bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha dan mengetahui langkah-langkah penerima bantuan program ini. Untuk sebuah program jika ingin program tersebut berjalan dengan implementor dan pemilik UMKM harus memiliki sikap yang tegas untuk memperlancar jalannya program

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana sudah berjalan dengan optimal karena memahami SOP penerimaan bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha akan tetapi kurangnya sikap tegas dalam menjalankan program ini.

Pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakter tegas dan ketat aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Apabila kebijakan publik ini tidak terlalu merubah perilaku manusia maka dapat saja agen pelaksana yang dirumuskan tidak setegas yang digambarkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan diatas maka dapat di simpulkan bahwa karakteristik aseen pelaksana sudah berjalan dengan optimal dikarenakan memahami sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penerimaan bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha akan tetapi kurangnya sikap tegas dalam menjalankan program ini.

### **Kecenderungan Pelaksana**

Sikap pelaksana dari suatu kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari sebuah program. Sikap penerima dan penolakan dari pelaksana harus menjadi perhatian yang khusus dalam menjalankan program yang ingin dicapai. Hal ini sangat mungkin terjadi karena suatu kebijakan bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang memahami betul persoalan dan permasalahan yang terjadi. Dukungan dari pelaksana membantu pelaksana program ini dengan baik, dengan dukungan dari pelaksana maka bisa terwujudnya komitmen dari para pelaksana untuk melaksanakan program ini dengan sebaik baiknya.

Hal ini juga dapat disampaikan pernyataan oleh staf dinas koperasi dan UMKM berikut hasil wawancaranya:

*“dengan dukung penuh terhadap program ini untuk para pelaku usaha dan program ini bagus sekali karena membantu para pemilik UMKM mulai dari bantuan yang telah diberikan, saya harap dana yang telah diberikan digunakan dengan benar-benar, karena ini diperuntukan untuk kebutuhan usahanya, dan semoga kedepannya program kita dapat berkembang sesuai apa yang kita harapkan. (wawancara Ibu Isti selaku Pelaksana Kasubag Umpeg Kab.Pandeglang. senin 2 november 2020)”*

Sementara itu dari pemilik UMKM yang menerima program bantuan ini menyampaikan pernyataan dengan adanya program ini sangat membantu para pemilik UMKM mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa kecenderungan pelaksana berjalan baik karena instansi dan implementor mendukung program ini sangat baik, dan hasil pengamatan terdapat respon yang sangat baik dari para pemilik usaha di Kabupaten Pandeglang.

Sikap atau kecenderungan yang di laksanakan bukan hasil formulasi dari warga setempat yang mengetahui persoalan yang terjadi, tetapi kebijakan yang dilakukan adalah *topdown* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus di selesaikan. Seperti yang dapat di sampaikan oleh Edward III dalam (Widodo, 2010) jika implementor mempunyai disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka dalam proses implementasi kebijakan menjadi tidak akan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kecendrungan pelaksana berjalan baik karena instansi dan implementor mendukung program ini sangat baik, dan hasil dari pengamatan terdapat respon yang sangat baik dan positif dari para pemilik UMKM di Kabupaten Pandeglang.

### **Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Komunikasi sangatlah dibutuhkan dalam penyampaian informasi dalam pelaksanaan kebijakan, mengenai apa yang ingin dituju dan sasaran dari sebuah kebijakan yang di terapkan. Komunikasi mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan ini harus dilakukan dengan konsisten dan mekanisme prosedur yang diterapkan untuk mencapai keberhasilan dari program tersebut. Maka dari itu komunikasi antara pelaksana harus dilakukan dengan baik agar pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut ini komunikasi antara implementor dalam penelitian Implementasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten. Pandeglang dilihat dari komunikasi antara dinas koperasi dan UMKM ke pemilik UMKM melalui seluruh instansi terkait yang akan dihubungi mengenai mekanisme pelaksanaan program ini

Dari hasil wawancara diatas komunikasi antar implementor berjalan dengan baik terkait waktu pengusulan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha dan implementor saling berkomunikasi. Komunikasi juga harus berjalan sampai ke para pemilik UMKM, karena untuk sasaran kebijakan program ini kepada para pemilik UMKM sendiri, maka dari itu dilakukan beberapa sosialisasi baik dalam bentuk langsung mengumpulkan para pemilik UMKM ke dinas terkait program ini dan mengirimkan surat terkait program pengembangan sistem pendukung usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan terkait komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana belum berjalan dengan optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada para pemilik UMKM di Kabupaten Pandeglang yang belum merata tersampaikan sehingga masih ada pemilik UMKM yang kurang mendapatkan informasi terkait Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha.

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standard an harus konsisten dan seragam dari

berbagai sumber informasi. Disamping itu koordinasi juga merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil dan begitu pula sebaliknya. Seperti yang diungkapkan oleh Edward bahwa implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementasi mengetahui apa yang harus dilakukan, yang dimana menjadi tujuan dan sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan terkait komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana belum berjalan dengan optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada para pemilik UMKM di Kabupaten Pandeglang yang belum merata tersampaikan sehingga masih ada pemilik UMKM yang kurang mendapatkan informasi terkait Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha.

### **Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Guna menilai kinerja implementasi kebijakan yaitu sejauh mana lingkungan eksternal yang ikut serta mendorong keberhasilan suatu kebijakan/program. Lingkungan sosial yang mendukung akan mempermudah perjalanan suatu program tersebut, berkaitan dengan implementasi program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM ini para pemilik UMKM yang berada di Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi dan kondisi lingkungan sudah berjalan dengan optimal karena implementor dalam hal ini Dinas koperasi dan UMKM sebagai pelaksana mengetahui kondisi ekonomi, dari pengamatan peneliti masih ada masyarakat yang tidak memiliki usaha tetapi menerima bantuan program ini.

Yang perlu di perhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan yang dimaksud lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan oleh karena itu, upaya dalam mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Sama seperti yang diungkapkan oleh (L.Weimer dan Aldan R.Vining, 1999:36) dalam melaksanakan sebuah kebijakan terdapat tiga kelompok besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi yang mencakup lingkungan ekonomi, sosial, politik, hankam, dan fisik atau geografis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi dan kondisi lingkungan sudah berjalan dengan optimal karena implementor dalam hal ini Dinas koperasi dan UMKM sebagai pelaksana mengetahui kondisi ekonomi, dari pengamatan peneliti masih ada masyarakat yang tidak memiliki usaha tetapi menerima bantuan program ini.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bagaimana implementasi program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pandeglang masih belum terimplementasikan secara efektif. Dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya kebijakan-kebijakan terukur dan mampu

diterima masyarakat, pemilihan prioritas sumber daya dan komunikasi intensif antar pelaksana sedangkan Karakteristik agen pelaksana sudah efektif, kecenderungan pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya kebijakan-kebijakan terukur dan mampu diterima masyarakat, pemilihan prioritas sumber daya dan komunikasi intensif antar pelaksana.

### Referensi

- Abdul Hakim., 2014. *Dinamika Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Pendekatan Konvensional dan Nilai-Nilai Islam)* Semarang : EF Press Digimedia
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In F. Edition (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. SAGE Publication, Inc .
- Dipta, W. I. (2007) “Strategi Membangun Keunggulan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Indonesia dalam Era Perekonomian Baru.” Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Sehari: “Revitalisasi Strategi Pembinaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi oleh Pemerintah/BUMN dalam Perekonomian Baru.” Jakarta.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Laswell, Harold D, 1970. dan Abraham Kaplan, *Power and Society*, Yale. University Press, New Haven
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. In *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications Inc.
- Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pradytia Herlyansah, (2016). *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang*
- UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah